

Pendekatan Inovatif Penggalangan Dana Tambahan

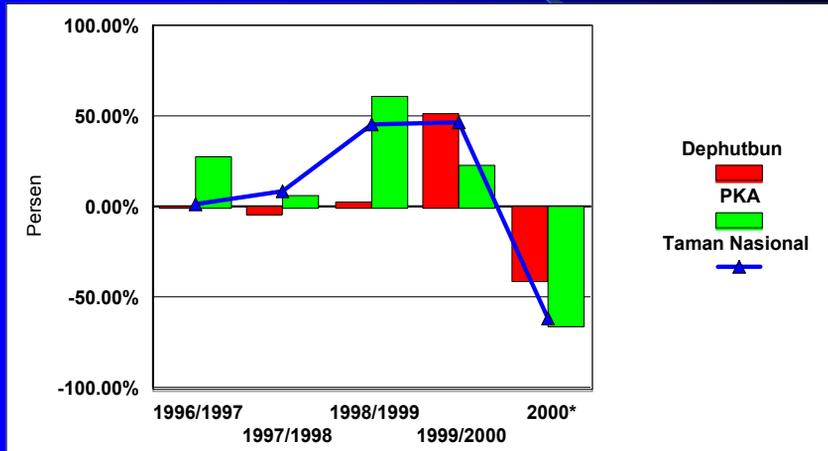
Elfian Effendi
NRM/EPIQ Decentralization Policy and
Conservation Finance Specialist

Jakarta, 25 Juli 2001

Mengapa Perlu Pendekatan Inovatif?

- ❖ Pembiayaan kawasan konservasi masih belum mencukupi (selama 10 tahun terakhir US\$0,56/hektar)
- ❖ APBN kritis, sementara sumber pembiayaan inovatif lain sangat potensial untuk dimanfaatkan
- ❖ Tekanan, ancaman, dan gangguan terhadap kawasan konservasi terus meningkat, sementara anggaran dari pemerintah terus menurun (nominal dan riil)

Dampak Krisis Anggaran terhadap Pembiayaan Rupiah Kawasan Konservasi (Kasus: Taman Nasional)



Pendekatan Inovatif yang Dikembangkan Oleh Program NRM/EPIQ

- I. **Memobilisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kawasan Konservasi (Project Site: TN Bunaken)**
 - ❖ Memperkuat peranan dan tanggung jawab pemangku kepentingan lokal (Rekomendasi Para Pihak, Dewan Pengelolaan TN Bunaken, 10 Program Bersama, Kegiatan Bersama)
 - ❖ Memfasilitasi pengembangan desentralisasi sistem pembiayaan taman nasional. Penerimaan dari pungutan masuk selama April-Mei 2001 sebesar Rp 180 juta, padahal sudah 10 tahun TNB disahkan, penerimaan PNBPN Rp 0

Lanjutan

- ❖ Memfasilitasi prakarsa para pihak untuk pengembangan Dana Abadi Bunaken (termasuk memberikan *small grant* untuk pengembangan Papua Trust Fund)
- ❖ Memfasilitasi penguatan komunikasi antara Dephut dengan para pihak di tingkat lokal (pelibatan Dephut dalam segenap proses kegiatan hingga Menhut meresmikan Dewan Pengelolaan TNB)
- ❖ Menjadi salah satu model *co-management* paling menarik dalam pengelolaan TN laut di Indonesia

Lanjutan

II. **Memfasilitasi Penerapan *Debt-for-Nature Swap* (DNS) di Indonesia**

- ❖ Mempromosikan dan memfasilitasi proses penerapan Bilateral Debt Swap kepada DepKeu, Bappenas, Kantor Menko Perekonomian, dan Dephut (Bilateral DNS masuk dalam REPETA 2002)
- ❖ Mempromosikan dan memfasilitasi proses penerapan *private swap* kepada Jakarta Initiative dan BPPN (termasuk Kantor Menko Perekonomian)
- ❖ Memfasilitasi Yayasan Kehati untuk mengambil peranan kunci dari pihak LSM dalam proses penerapan DNS

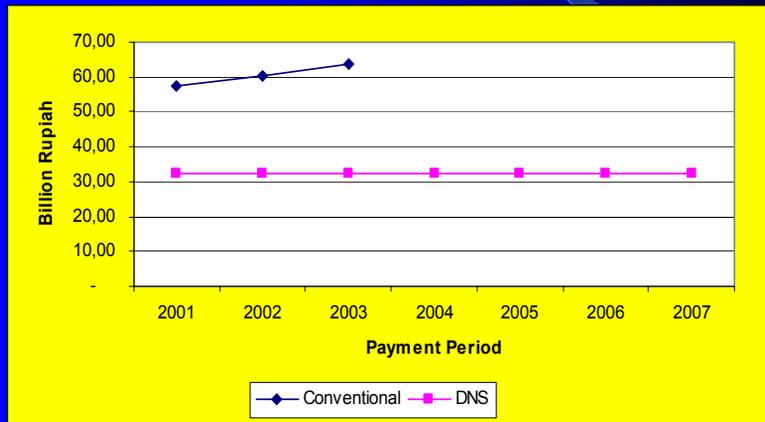
Restrukturisasi Utang Bilateral Pemerintah: Kasus Akumulatif sebesar US\$500 Juta



Transaksi Debt-for-Nature Swap dalam Restrukturisasi Utang Komersil Pemerintah dan Swasta: Kasus US\$20 Juta



Restrukturisasi Utang Konvensional dan Debt-for-Nature Swap: Kasus US\$20 Juta Utang Komersil Pemerintah dan Swasta



Lanjutan

III. Kemitraan

- ❖ Bermitra dengan sektor swasta untuk mendapatkan dana tambahan non-APBN (Kemitraan Kutai)
- ❖ Bermitra dengan masyarakat lokal (Contoh: Forum Masyarakat Peduli TNB)
- ❖ Bermitra dengan para pemangku kepentingan di tingkat lokal (Contoh: Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken)

Tiga Kebutuhan ke Depan

Tiga kebutuhan Dephut (DitJen PHKA) yang perlu mendapat prioritas penting:

- ❖ Desentralisasi pengelolaan kawasan konservasi dengan memperkuat peranan dan tanggung jawab para pihak di tingkat lokal
- ❖ Penerapan '*Co-Management Approach*' sehingga dapat memperkecil intensitas konflik mengenai '*siapa berwenang apa dan siapa bertanggung jawab apa*'
- ❖ Penggalangan dana tambahan baik secara domestik dan internasional